

**NOTULEN**  
**RAPAT PERSIAPAN AKREDITASI KOORDINASI**  
**PENGADILAN NEGERI BANGIL**  
**HARI : SENIN, TANGGAL : 10 OKTOBER 2016**

Hari / Tanggal : Senin, 10 Oktober 2016  
Waktu : Pukul 07.30 WIB - selesai  
Tempat : Ruang Sidang Cakra  
Acara : Rapat Persiapan Akreditasi

Rapat dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil didampingi Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris dan dihadiri oleh 47 (empat puluh dua) pegawai dari 49 (empat puluh sembilan) pegawai yang terdiri dari Hakim, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, Staf dan Tenaga Kontrak/Honorer.

Dengan Hasil sebagai berikut :

Meja Informasi difungsikan dengan para tenaga kontrak/honorer yang melakukan piket informasi secara bergiliran dalam setiap bulannya. Di meja sekretaris Ketua agar dipasang juga jaringan PABX/line phone.

Kasubbag Kepegawaian Ortala agar SK Penegakan Disiplin yang telah dibuat segera diinformasikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai mestinya. Tim Pengawasan Penegakan Disiplin segera dibentuk dan diketuai oleh Wakil Ketua Pengadilan, dengan anggota Hakim I Ketut Martawan dan Panitera/Sekretaris.

Pelaksanaan sidang tipiring dan tilang ditentukan dalam 1 (satu) minggu pada hari jumat dan apabila berkas perkara tilang lebih

dari 300 (tiga ratus) berkas maka sidang dibagi menjadi 2 tempat dan 2 hakim dan PP/.

Panitera Muda Pidana segera membuat surat dan mengirimkan kepada Kepala POLRES Pasuruan agar memberitahukan bahwa hari sidang tilang dirubah kembali menjadi hari jumat.

Honor/tenaga kontrak yang piket informasi harus datang jam 06.00 pagi dan melakukan serah terima di Buku Piket/Serah Terima Piket dari piket jaga malam ke piket meja informasi.

Laporan Pengawasan agar dibuat rangkap 5 (lima) untuk dibagikan kepada Ketua, Wakil Ketua , panitera/Sekretaris dan Panmud/Kasubbag bidangnya.

Laporan Hakim Pengawas Bidang Kepegawaian Ortala melaporkan bahwa pelaksanaan tugas mengani pengusulan kepangkatan dan pembuat SK KGB telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur. Absen sudah berjalan baik secara manual dan finger print dan diinput ke komdanas. Akan tetapi terdapat kendala akan Aplikasi SIKEP dimana data pegawai dalam SIKEP terhapus menyisakan hanya 1 (satu) nama orang pegawai. Penanganannya agar Sub bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi segera berkoordinasi dengan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung untuk mencari solusi terbaik. Pembuatan Kartu Identitas Pegawai yang baru masih dibahas.

Laporan Hakim Pengawas Hukum bahwa Prosedur meja informasi agar dipasang supaya bisa mudah diakses/dibaca oleh pengunjung dan harus dipelajari dan dikuasai oleh petugas meja informasi.

Laporan Hakim Pengawas Umum dan Keuangan, melaporkan agar papan nama hakim/pejabat/unsur pimpinan baru belum terpasang di tempat yang seharusnya. Realisasi Anggaran DIPA 01 sebesar 80,52 % dan DIPA 03 63,27 %. Ruang Mediasi belum ada nomenklatur, Ruang Tahanan sudah baik, Toilet Timur dalam keadaan

rusak, Ceklis Perawatan/pemeliharaan dan ceklis kebersihan belum ada dan agar segera dibuat, jadwal petugas piket sudah dibuat, bagian barat gedung masih banyak puing/limbah bekas pekerjaan konstruksi yang belum dibersihkan. Nomenklatur tiap ruangan dan DIR harus segera dibuat dan diperbaharui sesuai dengan kondisi yang ada.

LAKIP tahun 2012 s/d 2014 belum dimasukkan ke website. Penghapusan BMN yang rusak harus segera diusulkan kembali dan perlu berkoordinasi dengan Pengadilan Tinggi untuk mencari jalan keluar yang terbaik dalam penyelesaian akan status BMN dan penghapusan BMN. Ruangan POSBAKUM agar dipindah dan diberikan meja kerja bagi pengacara piket untuk melaksanakan pelayanan pos bantuan hukum.

Laporan hakim Pengawas IT bahwa dalam SIPP masih ditemukan perkara yang hingga 14 (empat belas) hari masih belum di input amar putusan. SOP dari masing-masing bagian agar segera dikumpulkan ke Bagian IT untuk diupload ke Website. Laporan Keuangan Perkara telah dimasukkan ke Website, Pelayanan Informasi publik masih belum maksimal. SK yang terbentuk mengenai persiapan akreditasi dan lainnya masih banyak yang belum diserahkan ke Bagian IT untuk ditampilkan di web.

Bagian tehnik perkara agar register segera ditutup setiap akhir bulan dan laporan statistik belum ada. Arsip mulai dari tahun 2008 s.d 2016 berkas kasasi tidak masuk dalam box tersendiri. Berkas Perdata belum tertata. Berkas perkara yang telah inkraacht segera dilimpahkan ke bagian hukum/arsip.

Pelayanan di meja informasi agar ditunjuk 1 (satu) orang honorer dan jurusita yang menguasai bidang hukum. Tersedianya form permohonan informasi di meja informasi. Bagian Hukum harus melaporkan kegiatan POSBAKUM setiap minggu untuk direkap dan

setiap bulannya dilaporkan ke Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

Laporan hakim Pengawas hakim perdata, Uraian tugas dan papan nama telah dipasang disetiap meja pegawai akan tetapi Alur Perkara Perdata belum ada/atau masih yang lama dan tidak sesuai dengan peraturan yang baru. Register Penyitaan di Perdata masih kosong. Ketua Majelis harus melakukan kontrol terhadap anggota dan PP nya untuk memasukkan data perkara dalam SIPP.

Dalam pengajuan permohonan eksekusi agar segera diserahkan ke Ketua Pengadilan setelah melalui tim telaah eksekusi terlebih dahulu.

Laporan hakim Pengawas Pidana. Pada register perkara pidana dalam kolom penyerahan BA eksekusi masih kosong karena JPU tidak pernah menyerahkan berita acar eksekusi. Buku register Tim Hakim Pengawas dan Pengamat belum ada. Register lama agar disimpan dalam arsip gedung pengadilan yang lama.

Bangil, 10 Oktober 2016

**Ketua  
Pengadilan Negeri Bangil,**

**Quality Manager  
Representative,**

**Dr. GUTIARSO, SH., MH  
NIP 19660508 199212 1 001**

**YAMTO SUSENA, SH., MH  
NIP 19670112 199603 1 001**

**Notulis Rapat,**

**WAWAN PRIHIDAYANTO  
NIP 19730524 199303 1 001**